

EVALUATION OF THE PROGRAM TO IMPROVE THE WELFARE OF POOR FAMILIES IN SALASSA VILLAGE, CURIO DISTRICT, ENREKANG DISTRICT

Muhammad Nur Yamin¹, Herfida², Ismail³, Oky Nur Pratiwi Johansyah^{4*}

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makasar

*e-mail Correspondence: oky.nur.pratiwi@unm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the Evaluation of the Welfare Improvement Program for Poor Families in Salassa Village, Curio District, Enrekang Regency. This research uses a qualitative method and produces descriptive data. Data collection is used by interview, documentation, and observation techniques. The data obtained from the research results are processed using interactive model analysis, namely data collection, data presentation, data condensation, drawing conclusions. The results of the study showed that the evaluation of the welfare family card (KKS) improvement program in Salassa Village, Curio District, Enrekang Regency, in general, had not been fully successful from the six (6) evaluation indicators, namely Efficiency, Responsiveness, Effectiveness, Adequacy, Equity and Accuracy. The Responsiveness indicator shows that the community's response is very good with the KKS program, effectiveness shows that it has not gone well because sometimes the distribution of aid is done once every 3 months, Efficiency shows that this assistance has not been said to be efficient because many still do not understand the details of the assistance received, Equity shows that it has not gone well because there are still many people who are classified as underprivileged getting assistance with the Prosperous Family Card, Adequacy shows that it is not enough because this assistance is not evenly distributed, Accuracy shows that this assistance is appropriate because this assistance is in accordance with existing procedures and names. assistance that comes out according to DTKS data. It is suggested that the process of updating the data must be further improved and preferably in the future it is better to prioritize the process of selecting data from RTSM/KSM so that there is no longer dependence on assistance and can utilize the assistance properly.

Keywords: Policy Evaluation, Family Welfare Card Program

PENDAHULUAN

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang berfungsi sebagai penanda masyarakat kurang mampu dan juga sebagai kartu identitas untuk mendapatkan program simpanan keluarga sejahtera. Awalnya program tersebut adalah hasil dari pengembangan program sebelumnya, yaitu dengan nama kartu perlindungan sejahtera (KPS) yang telah di laksanakan pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kini program tersebut diubah secara bertahap menjadi kartu keluarga sejahtera (KKS).

Secara umum faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitik beratkan kajian pada sumber terdiri dari dua bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. KKS merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan, terkadang bantuan KKS ini bersifat subjektif dan proses penyeleksian dilakukan dengan menggunakan waktu yang begitu lama dan kartu ini lebih di

preoritakan kepada masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

Memajukan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi tugas dari pihak pemerintah. Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan warga masyarakat, oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Kesejahteraan yang berhasil sangat penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan memertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya membuat sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia akan semakin tinggi.

Meskipun tidak satu Batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, Pendidikan, Kesehatan dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, vol.7, NO.7, 2023

kemiskinan dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh yaitu: umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, Kesehatan, anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang yang didalamnya mencakup masalah kemiskinan masyarakat. Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan

Masalah kemiskinan di pedesaan dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah mereka yang hidup di bawah standar keluarga miskin yang memiliki standar kemiskinan yang pendapatannya Rp, 500.000.00 – Rp,1.000.000.00 juta perbulan di masukan dalam golongan prasejahtera yaitu umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Selain itu, pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha, sedangkan penghasilan masyarakat yang masuk pada golongan sejahtera yang memiliki penghasilan Rp, 2.000.000.00 – Rp, 4.000.000.00 /bulan dan mempunyai faktor produksi sendiri.

Desa Salassa Kecamatan Curio tingkat kemiskinan relatif tinggi yang mencapai 59% jumlah keluarga miskin sejak 1 tahun terakhir yang saat ini mencapai 1143 penduduk dengan 294 kartu keluarga dan 9 macam program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan salah satu program pemerintah yakni kartu keluarga sejahtera (KKS) yang merupakan program utama di desa Salassa Kecamatan Curio saat ini mencapai 148 Kepala keluarga yang mendapatkan bantuan pangan Non tunai dengan uang melalui transfer ke rekening kartu keluarga sejahtera sejumlah Rp. 200,000 per bulan dan di konverensi menjadi bantuan sosial seperti beras 10 kg, ikan, telur dan tempe.

Pemerintahan Desa Salassa mengolompokan masyarakatnya dengan dua golongan yaitu sejahtera dan pra sejahtera. Golongan pra sejahtera ini disamaartikan dengan keluarga miskin yang kriterianya antara lain:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / buang air besar di kali/di kebun
5. Sumber air minum berasal dari sumur buatan/mata air tidak terlindung/sungai.
6. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar.
7. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5ha, buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,00 per bulan.
8. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah hanya tamat SD.
9. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti: sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Masyarakat Desa Salassa mayoritas berprofesi sebagai petani karena tingkat pendidikan masyarakat desa ini relatif rendah. Masyarakat dalam kategori miskin hanya memiliki lahan pertanian yang sempit, antara 0,25-0,5 ha. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang minim. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memulai merintis usaha kecil produksi makanan.

Kemiskinan di Desa Salassa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang timbul mengakibatkan tidak berkembangnya perekonomian secara aktif. Peluang kerja sangat minim karena tidak adanya usaha mikro masyarakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Desa hanya menjalankan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat yaitu program BPMT (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan WC, Makanan tambahan balita (mencegah stunting), bantuan ternak, KIP (kartu Indonesia pintar) dan KIS (Kartu Indonesia sehat). Beberapa bantuan dari pemerintahan Desa untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada baik dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya masih terbatas.

Upaya program pemerintah melalui berbagai program kesejahteraan keluarga dalam mengurangi masyarakat miskin. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa

proposal yang berjudul “Evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang timbul memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga perlu di adakan evaluasi maka peneliti tertarik untuk meneliti yaitu “mengetahui sejauh mana suatu program kesejahteraan keluarga terhadap kemiskinan. Untuk penelitian ini megambil judul “Evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa kecamatan Curio kabupaten Enrekang

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memperoleh pemahaman holistik tentang fenomena yang dihadapi subjek penelitian. Desain penelitian ini menggunakan narasi pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh dan dijelaskan dalam kata-kata terminologi ilmiah. Penelitian ini, diharapkan mampu mendapatkan berbagai informasi tentang evaluasi program peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap kemiskinan pada kantor desa Salassa secara seksama dan komprehensif, untuk selanjutnya diproses berdasarkan teori hingga dapat diambil kesimpulan diakhir penelitian. Adapun fokus

penelitian ini menggunakan teori Wiliam N Dun dengan indikator 1.Evektifitas 2.Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas

Efektifitas dalam Evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan pada program evaluasi peningkatan kesejahteraan keluarga diperoleh bahwa Efektifitas yang dilakukan untuk mengevaluasi program peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan dua acuan sebagai dasar untuk mengetahui keefektifitasan program KKS yaitu komitmen dan pertemuan bulanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan bahwa Efektifitas ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan masih banyak masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan dan tidak mendapat bantuan karna proses pemilihan masih menggunakan data yang lama dari DTKS.

2. Efisiensi

Efisiensi artinya seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan Evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dapat dikatakan tidak berhasil karena kadang pembagian bantuan di lakukan 3 bulan sekali. Untuk mencapai efisiensi dalam evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang diperlukan usaha maksimal dari dinas sosial dan beberapa penegelola kartu keluarga sejahtera setiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisi yang peneliti lakukan dalam program peningkatan kesejahteraan keluarga miskin telah ditemukan bahwa pada proses pencairan kadang tidak terlaksana dengan baik. Pencairan telah dilakukan oleh kordinator KKS Kecamatan Curio dan pembagian lagsung di lakukan oleh masing – masing penerima tanpa perantara. Bantuan disalurkan kepada pemegang kartu KKS dan langsung di kirim ke kartu masing-masing namun kadang terjadi proses pencairan yang lama dikarenakan beberapa pemegang kartu KKS tidak memiliki saldo bahkan sering dilakukan pembagian bantuan selama 3 bulan sekali.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dilihat dari seberapa jauh usaha yang dilakukan di Desa Salassa. Berdasarkan hasil wawancara dan analisi yang peneliti lakukan dalam program peningkatan kesejahteraan keluarga miskin belum di katakana cukup karena masih banyak masyarakat yang tergolong masyarakat pra sejahtera tidak mendapat bantuan dan kadang kita lihat sudah sejahtera dia yang dapat di karenakan data yang di gunakan masih data dari DTKS yang lama.

4. Pemerataan

Perataan dalam evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dilihat dari pembagian bantuan yang

diberikan pemerintah apakah sudah merata kepada masyarakat yang termasuk dalam pra sejahtera. Dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dalam program peningkatan kesejahteraan keluarga miskin sulit digolongkan dalam kategori rata karena bantuan ini bukan hanya untuk satu atau dua desa saja melainkan hampir seluruh Indonesia, bantuan ini di programkan oleh pemerintah setempat sehingga jika diharapkan ingin merata sangat sulit karena masih banyak bantuan lain yang di berikan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dilihat dari respon masyarakat apakah mereka sudah merasa puas dengan bantuan tersebut. Dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dalam program peningkatan kesejahteraan keluarga miskin bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam perekonomian.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi program KKS tidak dapat mengurangi kemiskinan program ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan sudah tepat sasaran. Dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dalam program peningkatan kesejahteraan keluarga miskin bahwa program ini sudah sesuai dengan aturan sehingga program ini dikatakan tepat sasaran karena dalam proses pemilihan pemegang kartu KKS di tentukan oleh data DTKS dan proses pemilihan pemegang kartu KKS perlu melewati banyak proses dan tahap.

KESIMPULAN

Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan KKS belum bisa dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diadakannya program KKS yang di mana program ini bertujuan mampu memecahkan masalah yang dihadapi DTKS.

KKS yang dilaksanakan di Desa Salassa Kecamatan Curio sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah bisa dikatakan sejahtera tapi masih mendapatkan bantuan KKS, namun ada juga yang layak untuk menerima bantuan KKS tapi tidak mendapatkan bantuan, sehingga bantuan yang di berikan kurang tepat sasaran. Walaupun telah dilakukan pemukhtairan data setiap bulan tetapi tetap saja bantuan ini belum baik dan belum tepat sasaran sehingga bantuan ini dikatakan tidak dapat mengurangi kemiskinan tetapi hanya membantu masyarakat miskin dalam segi perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Eneka Cipta.
- Akbar, M.A dan Mohi, W.K. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan, Sourcebook* Gorontalo: ideas publishing.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. *Analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi, P dan Budi, S. 1996. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media
- Irfan, S.B & Laily, D. A. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lincoln Arsyad. 2016. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Miles, M. B, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed.3 USA: Sage Publication.

Jurnal Aktor

Vol. 3, No. 1, Oktober 2023

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suherman Rosyidi. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

- Bapennas. 2004. dikutip oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”, (*Jurnal Ekonomi*).
- Euis Sunarti. Indikator Keluarga Sejahtera. 30 September 2022. Institusi Pertanian Bogor, H. Ummac. I. 2016. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan. *Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*.
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., Putu, N., & Dewi, M. 2011. Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*,
- Monika, Andini, Sudadio dan Suherman. 2019. Program Peningkatan Kesejahteraan Kapasitas Keluarga. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Nunung Nurwati. 2008. Januari 1. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan”, (*Jurnal Kependudukan Padjajaran*)
- Suherman Rosyidi, 2012. di kutip oleh Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Diprovinsi Kalimantan Barat”, (*Jurnal Ekonomi Sosial*)

Peraturan Perundang-undangan:

- Intruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan presiden republik Indonesia Nomor.166 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Skripsi

- Nurfazlina.2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.